



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 29 (dua puluh sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 2 Juli 2024
Waktu	: Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di berbagai daerah;2. Penyelesaian atas kasus-kasus klaim peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;3. Evaluasi terhadap perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan, serta capaian target kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 25 dari jumlah 50 Anggota Komisi IX DPR RI;2. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri (Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan), beserta jajaran;3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 10.37 WIB., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal:
 - a. perlindungan pekerja/buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor;
 - b. penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen;
 - c. koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri;
 - d. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan terobosan sosialisasi diberbagai daerah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian:
 - a. implementasi hasil pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan kepesertaannya.
4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini, selambat-lambat tanggal 9 Juli 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.06 WIB.

Jakarta, 2 Juli 2024

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



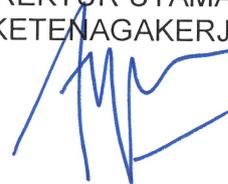
EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS
KETENAGKERJAAN



MUHAMMAD ZUHRI BAHRI

DIREKTUR UTAMA BPJS
KETENAGAKERJAAN



ANGGORO EKO CAHYO